

PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN PARPOL
Studi Tentang Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam
Kegiatan Parpol Pada Pelaksanaan Pilkada Di Provinsi Jambi Tahun 2005

Oleh :
Hendri Koeswara, S.IP¹

Abstrak

Sejumlah kader perempuan dalam parpol tidak dapat berpartisipasi penuh apalagi dicalonkan sebagai caleg ataupun sebagai calon kepala daerah pada pilkada. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh kader perempuan itu sendiri, diantaranya yakni kesulitan perempuan dalam membagi waktu antara kegiatan partai dan keluarga serta pemahaman dan wawasan politik yang dimiliki kader perempuan masih kurang terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut.

I. Pendahuluan

Dalam realitas politik di banyak negara termasuk Indonesia, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan. Selama ini jika kita bicara dunia politik, yang terjadi adalah diskriminasi atau peminggiran politik terhadap perempuan di dalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Konsep-konsep seperti kompetisi, partisipasi politik serta kebebasan sipil dan politik dalam riel politik ternyata hanya terbatas pada dunia laki-laki (dunia maskulin). Walaupun perempuan terlibat disana, mereka pun harus masuk dan berperilaku politik dalam dunia laki-laki. Diskriminasi seperti ini lebih didasarkan pada apa yang disebut sebagai keyakinan gender, dan ini menjadi dasar ketidakadilan di berbagai tingkatan mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga lingkungan pemerintahan atau negara.

Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, maka yang terjadi adalah representasi perempuan yang rendah di dalamnya. Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya pengambilan keputusan dimana hasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengenai kepada mereka. Idealnya semua komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil dan bahkan melanggar hak asasi manusia, jika perempuan masih juga dimarginalisasikan atau didiskriminasikan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.

Namun yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Provinsi Jambi tahun 2005, tampak sedikit kader perempuan yang ikut terlibat dalam aktivitas riil politik pada proses pelaksanaan Pilkada langsung tersebut, terutama pada kegiatan politik pada partai masing-masing. Hal ini mungkin dikarenakan memang dari diri perempuan itu sendiri

¹ Penulis adalah dosen jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, Padang

yang tidak berminat untuk terjun kedalam aktifitas riil politik pada pelaksanaan Pilkada dan kondisi itu juga semakin dipersulit oleh aturan dan pola yang diberlakukan partai yang tentu tidak mudah bagi perempuan untuk dapat menembusnya.

Selain itu keterlibatan kader perempuan di dalam kegiatan partai juga sangat dipengaruhi oleh dana. Tanpa dana yang cukup dan memadai mustahil bagi perempuan untuk bisa ikut secara total di dalam kegiatan partai. Meskipun kadang-kadang kader perempuan bersedia mengeluarkan sejumlah dana sebagai salah satu kriteria untuk dapat dijadikan sebagai bakal calon kepala daerah dari partainya, tapi kurang disupport oleh suami, dan bagi perempuan sulit untuk mengorbankan kepentingan keluarga untuk berpolitik misalnya berkampanye.

Pola kerja yang diterapkan dalam partai seperti pertemuan dan rapat-rapat perencanaan kampanye untuk Pilkada baik itu disengaja ataupun tidak secara intens dilaksanakan pada malam hari. Itu berarti secara tidak langsung parpol telah membuka peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk bisa dapat mengikuti kegiatan parpol. Namun bagi perempuan hal itu sangat mengganggu jadwal perempuan karena pada saat yang sama ia harus sudah berada dirumah untuk membimbing anaknya belajar. Belum lagi keharusan kampanye keluar daerah dalam rangka memobilisasi dukungan bagi partainya yang dilakukan selama sehari-hari yang membuat perempuan harus meninggalkan keluarga untuk beberapa lama membuat perempuan semakin sulit untuk dapat menghadiri dan mengikutinya.

Kondisi demikian juga terjadi dalam proses kampanye pilkada di Provinsi Jambi dimana terlihat sedikit sekali kader perempuan partai yang terlibat dalam kegiatan riil dilapangan yang juga tergambar dalam susunan tim kampanye yang dibentuk oleh parpol-parpol pendukung calon kepala daerah masing-masing. Disana terlihat bahwa hanya beberapa orang saja kader perempuan yang ikut terlibat didalamnya. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel I. 3
Jumlah Tim Kampanye Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pilkada Di Provinsi Jambi Tahun 2005

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PARTAI YANG MENDUKUNG	JUMLAH TIM KAMPANYE
1	H. Zulkifli Nurdin dan H. Antony Zeidra Abidin	PAN, GOLKAR, PBB, PNIM, PKS	Laki-laki : 123 Perempuan : 13 Jumlah : 136
2	H. Hasip Kalimuddin Syam dan H. Hr. Arbain	PPP, PKB, PKPB	Laki-laki : 110 Perempuan : 13 Jumlah : 123

3	H. Usman Ermulan dan H. Irsal Yunus	PDIP, PBR	Laki-laki : 43 Perempuan : 5 Jumlah : 48
---	---	-----------	--

Sumber : KPU Provinsi Jambi, *Daftar Tim Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi tahun 2005*.

Demikian juga halnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dimana dalam hal ini dibutuhkan saksi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah yang itu berarti berasal dari parpol peserta pilkada. Di sini proses penunjukan saksi dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol dimana dalam proses ini banyak didominasi oleh kader laki-laki sebagai mayoritas dalam partai. Proses penunjukan tentu saja didasarkan pada berbagai kriteria. Dalam proses itu penunjukan banyak ditujukan pada kader laki-laki karena mereka menganggap kinerja dari kader laki-laki lebih unggul dari perempuan karena perempuan memiliki beban ganda seperti tanggung jawabnya terhadap suami dan anaknya dirumah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja untuk ikut terlibat dalam kegiatan partai tersebut. Selain itu kader perempuan sebagai minoritas dalam partai merasa tidak mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan kader laki-laki dengan jumlah yang minoritas tersebut.

Padahal telah ada perjuangan dari gerakan perempuan selama ini yang selain berhasil dalam mendapatkan hak-hak politik yang sama bagi perempuan, juga menghasilkan perubahan dalam pemahaman mengenai politik. Betty Friedan, salah seorang tokoh feminis liberal, dalam bukunya, *The Feminine Mystique*, mengkritik definisi konvensional tentang politik yang hanya diartikan sebagai aktivitas yang berlangsung dalam wilayah institusi publik seperti partai politik, pemerintah, kelompok penekan atau kelompok kepentingan, dan organisasi masyarakat. Sementara itu, politik menurut pengertian yang baru adalah yang juga 'personal', atau yang pribadi. *The personal is political*, demikian slogan yang terkenal dari kalangan feminis pada umumnya. Bagi mereka, setiap kegiatan di mana ada relasi kekuasaan, maka itu adalah politik. Relasi tersebut bisa ditemukan dalam wilayah privat maupun publik.³

Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tersebut tentu saja menimbulkan sejumlah pertanyaan yaitu mengapa partisipasi politik perempuan masih rendah walaupun telah ada gerakan feminisme yang bisa menjadi loncatan bagi terwujudnya peningkatan partisipasi politik perempuan. Kondisi demikian berarti disebabkan adanya sejumlah kendala yang menghambat perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik didalam partai khususnya. .

Oleh karena itu sangat perlu kiranya digali lebih dalam lagi kendala apa yang dihadapi oleh diri kader perempuan itu yang menyebabkan kader perempuan partai politik tersebut tidak dapat terlibat secara penuh dalam proses pelaksanaan Pilkada langsung di Provinsi Jambi, mengingat Pilkada langsung ini berjalan dengan sukses serta pihak KPU Provinsi sebagai penyelenggaranya mendapatkan

³ Ani Widyani Soetjipto, " *Politik Perempuan Bukan gerhana*", Penerbit Buku Kompas : Jakarta, 2005, hal.26.

banyak pujian dari daerah-daerah lain diluar Provinsi Jambi dan menjadikan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi sebagai percontohan bagi Provinsi lain yang belum dan akan melaksanakan Pilkada⁴.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat permasalahan penelitian : *Mengapa kader perempuan parpol sedikit terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkada, dan apa yang menjadi kendala internal bagi kader perempuan parpol untuk bisa ikut terlibat penuh dalam pelaksanaan Pilkada tersebut ?*

II. Tinjauan Pustaka

Partisipasi adalah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas dalam mengeksploitasikan sumber-sumber pembangunan (Dryono, 1983). Partisipasi juga dapat dilihat dari partisipasi kualitatif, dan partisipasi kuantitatif (Djohani, 1996). Partisipasi kualitatif adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam pengambilan keputusan didalam berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada (penilaian dari segi bobot). Sedangkan partisipasi kuantitatif adalah keikutsertaan yang dihitung dari jumlah kehadiran (penilaian keikutsertaan secara fisik).

Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan dari pemerintahan (Soedjono, 1995). Menurut Budiardjo (1996) partisipasi politik juga mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan kontrak dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Sejalan dengan itu partisipasi politik perempuan menurut Huntington (1994) ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah sehingga kepentingan perempuan dapat tersalurkan dengan baik.

Partai politik dalam sistem demokrasi adalah lembaga politik yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, tak terkecuali aspirasi perempuan. Partai politik juga yang dapat membantu dan mendorong perempuan dapat dicalonkan atau terpilih untuk masuk dlam lembaga politik formal. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik khususnya lembaga-lembaga politik formal adalah sebuah realitas politik yang tidak bisa dihindari. Akses dan partisipasi politik perempuan dalam setiap tingkatan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan adalah hak asasi perempuan yang paling mendasar (*fundamental right*)⁷.

Kader Perempuan Partai Politik

Orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan partai politik dinamakan kader parpol. Yang dimaksud dengan kader parpol yaitu sekelompok warga negara yang dididik dalam suatu pendidikan kader dalam organisasi partai politik agar dapat menjadi kekuatan bagi parpol untuk dapat mencapai tujuan parpol tersebut. Kader-kader parpol tersebut tidak lain adalah manusia-manusia

⁴Diambil dari Artikel *Harian Jambi Independent* Tgl 28 Juni 2004.

⁷ Diambil dalam Nur Iman Subono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan The Japan Foundation : Jakarta, 2003, hal. 40.

baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai commitment kepada dasar-dasar dan cita-cita bangsa.⁸

Seorang kader harus mempunyai kemampuan untuk mendorong terjadinya berbagai perubahan, pembaharuan dan peningkatan kinerja dalam organisasi/partai serta sekaligus dapat berfungsi sebagai penggerak, pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan partai dan posisi kader sebagai anggota masyarakat yang berusaha turut andil dalam kehidupan masyarakat serta berperan sebagai anggota masyarakat yang proaktif. Begitu juga halnya dengan kader perempuan.

Keberadaan kader perempuan dalam partai politik memiliki fungsi antara lain yaitu⁹:

1. Dapat mengubah prioritas politik parpol dan budaya internal dalam parpol. Keberadaan perempuan dalam parpol yang turut mentransformasikan agenda-agenda yang dibicarakan memperlihatkan adanya perubahan budaya internal partai. Pendapat dari kader perempuan keluar dengan karakter khas dalam rapat-rapat partai dan justru masukan dari perempuan yang sering didengar dan dijadikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
2. Keterlibatan perempuan sebagai pengurus harian partai akan mampu mempengaruhi pembuatan keputusan dalam partai.
3. Pencapaian dan hasil partisipasi perempuan secara aktif tidak saja dalam merubah demokrasi internal dalam partai tetapi juga dalam program-program yang dilakukan oleh parpol terutama dalam arena kesejahteraan keluarga, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, lapangan kerja (ekonomi), dst.
4. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat seperti diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi di hadapan hukum, dan berbagai bentuk diskriminasi yang lain.

Negara dan masyarakat yang tidak melibatkan kalangan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sebetulnya mereka telah mencabut atau menyalahkan diri mereka sendiri atas aset kemampuan serta gaya pengambilan keputusan yang berbeda.

Kendala-kendala Terhadap Partisipasi Politik Perempuan

Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat rendah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan diantaranya¹² :

⁸ Drs. Madiri Thamrin Sianipar, *Pendidikan Politik Bangsa*, Penerbit Sinar Harapan Bangsa : Jakarta, 1984, hal.15.

⁹ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Penerbit buku Kompas : Jakarta, 2005, hal.78.

¹² Laporan Penelitian *Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik*, oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Prop. Sumbar kerjasama dengan Forum Pengkajian Pemberdayaan Perempuan Sumbar, tahun 2004.

1. Kondisi sosial budaya, dan psikologis yang masih sangat kuat menganggap perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dengan ideologi pembagian peran publik dan domestik.
2. Birokrat partai yang didominasi oleh laki-laki cenderung tidak memberi peluang kepada perempuan dalam penetapan nomor urut caleg. Penetapan nomor urut ditentukan oleh pimpinan partai yang pada umumnya laki-laki.
3. Adanya tafsir agama yang melarang perempuan berkecimpung di ruang publik.
4. Faktor internal perempuan itu sendiri terkait dengan kualitas SDM, pengetahuan, kecakapan berorganisasi, pendidikan, sikap mental, dan pemahaman tentang hak-hak politik yang masih rendah.
5. Kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan perempuan. Kalaupun ada, masih sangat lemah dalam sosialisasi, dan implementasinya.
6. Kurangnya penyajian, dan promosi aktivitas perempuan di bidang politik dibandingkan aktivitas politik laki-laki.

Sikap mental merupakan salah satu kendala perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Sehubungan dengan itu terdapat juga sejumlah kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri serta kelompok perempuan dalam perubahan sosial antara lain sebagai berikut¹³:

1. Kesulitan perempuan untuk menghilangkan perasaan malu dan takut salah yang merupakan akibat dari struktur budaya. Akibatnya, perempuan sukar menemukan identitas dirinya sebagai pribadi.
2. Ambisi pribadi yang didorong oleh emosi yang tidak terkendali akan mewujudkan persaingan yang tidak sehat di kalangan perempuan itu sendiri.
3. Pandangan stereotip telah merasuk ke dalam mental perempuan, menyebabkan perempuan kurang mampu berpikir tajam dan jernih, sehingga perempuan kerap ditinggalkan dalam pengambilan keputusan.
4. Kurang berani menerima kekuasaan, apalagi merebut kekuasaan.
5. Lingkungan menciptakan perempuan sebagai makhluk pemelihara yang melayani segala kebutuhan hidup, khususnya lewat lingkungan keluarga. Oleh karena itu, perempuan bermental sebagai makhluk yang dependen.
6. Berbagai kelainan jiwa mudah hinggap dalam diri perempuan, seperti keterasingan diri, rendah diri yang berlebihan, sikap tertutup yang ekstrem, dan sebagainya.
7. Ketidakmampuan menjalin persatuan yang solid karena tidak dapat mengendalikan rasa iri dan cemburu, sehingga mudah tercerai berai.

¹³ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Indonesiatara : magelang, 2004, hal.52.

8. Kurang berminat dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan lebih tertarik pada keterampilan motorik.
9. Kurang menyadari kekuatan perempuan sebagai kelompok yang sebenarnya dapat membuat gerakan-gerakan perubahan dalam masyarakat.
10. Cenderung menciptakan dunianya sendiri yang tertutup, karena merasa lebih aman.

Kelemahan-kelemahan yang ada pada diri perempuan tersebut kemungkinan disebabkan oleh struktur biologisnya. Laki-laki dan wanita masing-masing memiliki hormon khusus dan ciri biologis tertentu.

Berkaitan dengan kelemahan fisik wanita, maka dipastikan bahwa struktur biologis wanita memiliki kekuatan yang lebih lemah dan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan pada umumnya bersifat labil (*instabilite*) sehingga tidak mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang ingin ia wujudkan karena ketidakmampuannya menguasai diri sendiri dan mempertahankan aktivitasnya.

Hilangnya kepercayaan diri wanita telah menghalangi dirinya untuk produktif di berbagai bidang. Selain itu wanita hanya berminat pada kerja lapangan yang tidak membutuhkan aktivitas akal. Menurut Heymans, hal itu disebabkan karena berfikir abstrak dan serius merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi wanita pada umumnya. Mereka biasanya hanya puas dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan perasaan dan sifat instinktifnya. Fungsi keibuan wanita membuatnya harus berlaku lebih perasa dan cepat tanggap terhadap stimulus perasaan dibanding laki-laki.

Kemampuan instuisi banyak mendorong wanita untuk mengambil keputusan cepat yang tidak berlandaskan akal atau perasaan. Perasaan kewanitaan atau logika khusus wanita menggerakkan sifat kehidupan psikisnya, karena kedudukannya sebagai makhluk yang biasanya berinteraksi dengan manusia, bukan dengan pikiran dan prinsip umum. Laki-laki pada umumnya senang menerapkan prinsip umum, sedangkan wanita hanya tahu tentang situasi khusus.

Logika wanita adalah logika yang tidak mengingkari realitas, atau sebagaimana pendapat banyak orang, adalah logika yang lebih banyak memperhatikan individu dibanding realitas. Jadi, untuk menafsirkan perilaku wanita, kita tidak cukup dengan menganalisis organ tubuhnya atau menafsirkan hubungannya dengan berbagai fungsi tubuh.

Perilaku moral wanita dipengaruhi lingkungan dan pendidikan. Struktur biologis berperan penting karena merupakan dasar bagi sebagian besar perilaku wanita. Sebagian besar perbedaan yang ada antara laki-laki dan wanita baik dari sisi kemampuan rasional dan produk pemikiran, disebabkan oleh tidak seimbangannya kesempatan dan kebutuhan wanita terhadap dirinya serta masyarakat¹⁴.

¹⁴ DR. Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, Pustaka Hidayah : Bandung, 2005, hal.16.

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi kader perempuan parpol untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan parpol pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung di Provinsi Jambi Tahun 2005 terutama kendala yang berasal dari internal kader perempuan itu sendiri. Serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh kader perempuan dan parpol dalam mengantisipasi kendala tersebut untuk dapat meningkatkan partisipasi politik kader perempuan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan diketahui apa yang menjadi kendala kader perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan diharapkan menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak.

IV. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.

Tipe ini diharapkan dapat memberi gambaran secara mendalam tentang partisipasi politik kader perempuan dalam kegiatan parpol pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005 serta menjelaskan kendala yang dihadapi kader perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan parpol pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk menjelaskan dan memberikan gambaran tentang fenomena sosial yang ingin diteliti secara mendalam. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* seperti yang dikutip oleh *Moleong*, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati¹⁵.

Alasan digunakannya metode ini yaitu karena kurangnya partisipasi politik kader perempuan parpol dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Jambi merupakan suatu fenomena sosial yang perlu diteliti secara mendalam, karena cukup banyak kader perempuan yang duduk dalam kepengurusan parpol tersebut tetapi pada kegiatan riilnya kader perempuan tersebut tidak terlibat secara penuh dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Provinsi Jambi tahun 2005.

5.1. Lokasi Penelitian

Lokasinya adalah pada sekretariat DPD / DPW I Partai Politik di Provinsi Jambi yang beralamat di kota Jambi. Dengan alasan rendahnya partisipasi kader perempuan di provinsi ini padagal provinsi ini menjadi pelaksana pilkada terbaik.

5.2. Teknik Penjaringan Informan

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), dimana peneliti menentukan sendiri informan kunci dan informan biasa dengan alasan subyek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan

¹⁵ Lexy J Moleong , *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung 1997, hal 3.

aktifitas yang menjadi informasi yang dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik. Selain itu informan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah kegiatan partai politik dan pelaksanaan Pilkada. Dengan teknik pengumpulan data yang demikian maka penelitian ini mengandalkan sumber-sumber data sebagai berikut :

1. Informan Biasa

Informan ini fungsinya adalah untuk mendapatkan data-data sekunder tentang partai politik yang bersangkutan. Selain itu informan ini juga diandalkan untuk melakukan identifikasi terhadap informan kunci yang akan penulis lakukan dengan beberapa orang.

Informan biasa ini terdiri dari kader perempuan yang sudah cukup lama terlibat didalam kegiatan 5 partai politik tersebut dan juga kader laki-laki yang menduduki jabatan tertentu dalam kepengurusan partai masing-masing. Informan ini diasumsikan masih terlibat secara penuh / aktif pada lingkungan atau kegiatan parpol.

2. Informan Kunci

Informan ini fungsinya adalah untuk mendapatkan data primer yaitu yang akan penulis gunakan untuk menganalisa data yang berkenaan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Informan tersebut adalah para kader perempuan yang menjadi pengurus partai di Dewan Pengurus Daerah (DPD) / Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik di Provinsi Jambi karena kegiatan partai di daerah biasanya banyak dilakukan oleh DPD Parpol di Provinsi. Informannya adalah salah satu kader perempuan parpol yang masuk dalam struktur kepengurusan partai dan pernah maju sebagai caleg dalam pemilu legislatif tahun 2004 dan seorang lagi adalah kader perempuan parpol yang masuk dalam struktur kepengurusan parpol tetapi tidak pernah maju sebagai caleg dalam pemilu legislatif tahun 2004. Alasannya subjek ini telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan parpol dan menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan dan kegiatan parpol tersebut.

5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud tertentu. Maksud dari wawancara ini menurut *Lincoln* dan *Guba* antara lain : merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian¹⁶.

Dalam penelitian ini model wawancara yang dipakai adalah wawancara tak terstruktur. Menurut Moleong wawancara tak terstruktur dilakukan dengan alasan sebagai berikut¹⁹:

¹⁶ *Ibid*

¹⁹ Lexy J Moleong , *Op Cit* , hal 139.

Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam (*recorder*) untuk merekam hasil wawancara, karena keterbatasan kemampuan peneliti sebagai manusia, sulit untuk menyimak dan mencatat secara detail hasil sebuah wawancara.

Selain melakukan wawancara peneliti juga menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jambi (KPUD), Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Politik di Provinsi Jambi untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dan juga sebagai dasar acuan dalam melakukan wawancara dan mengumpulkan data-data lainnya yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan partisipasi politik kader perempuan dalam kegiatan parpol pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005.

5.4. Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami²⁰.

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisis menurut kemampuan penulis dan sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, maka penulis dituntut untuk membuat gambaran dan penjelasan yang kongkrit dari hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana proses analisis dimulai dari menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yang dalam hal ini data-data yang berasal dari DPD/DPW Parpol Provinsi Jambi dan KPU Provinsi Jambi, dan hasil wawancara dari para informan penelitian. Yang kemudian diklarifikasikan dan diinterpretasikan kemudian ditelaah sesuai dengan unit pembahasan yang telah diteliti sehingga diperoleh jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan.

VI. Kendala Kader Perempuan Berpartisipasi Penuh Dalam Kegiatan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pilkada

Kendala yang dihadapi oleh kader perempuan tersebut umumnya berasal dari diri perempuan itu sendiri, karena pada dasarnya partai politik telah memberikan kesempatan yang sama bagi kader perempuan untuk dapat terlibat penuh dalam kegiatan partai terutama pada pelaksanaan pilkada di Provinsi Jambi ini.

Berikut ini penjabaran berbagai kendala yang dihadapi oleh kader perempuan untuk dapat terlibat penuh dalam kegiatan partai dalam rangka pelaksanaan pilkada langsung di Provinsi Jambi tahun 2005 dalam beberapa proses tahapan pelaksanaannya yaitu sebagai berikut ;

²⁰ *Ibid*, hal 103

Kendala Pada Tahap Penetapan Dan Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Tahapan pelaksanaan pilkada seperti pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dilaksanakan oleh partai politik peserta pilkada. Di dalam partai golkar proses ini dilakukan dengan mengadakan rapat mulai dari pengurus anak cabang, ranting hingga pengurus daerah untuk menetapkan siapa yang bakal dimajukan sebagai calon dari partai golkar.

Di partai ini salah satu kader perempuan sempat maju sebagai bakal calon yaitu ibu Hj. Azizah Daqryati Uteng Suryadiatna, namun dalam konvensi yang diadakan oleh pengurus pusat partai gilkar di Jakarta akhirnya memutuskan untuk mencalonkan H. Antony Zeidra Abidin sebagai pasangan calon kepala daerah dari partai golkar berpasangan dengan calon kepala daerah dari PAN yaitu H. Zulkifli Nurdin.

Salah seorang kader perempuan partai yang mengikuti perkembangan dan alur penetapan calon kepala daerah dari partainya menyatakan bahwa banyak hal yang telah ia lakukan untuk mendukung bakal calon dari kader perempuan itu untuk bisa maju sebagai calon dari partainya tersebut. Ia berusaha mengumpulkan suara dan tanda tangan sebagai dukungan dari kader dan simpatisan partai.

Di PAN proses pencalonan berjalan lurus tidak seperti yang terjadi di partai golkar yang akhirnya beralih arah mencalonkan kader laki-laki. Di PAN sejak awal memang telah mencalonkan H. Zulkifli Nurdin sebagai calon dari partainya, karena calon tersebut mendapat banyak dukungan mulai dari arus bawah partai hingga tingkat pengurus daerah.

Di PDIP proses rekrutmen calon kepala daerah dilakukan dengan cara setiap anak cabang maupun ranting mengirimkan masing-masing calonnya untuk kemudian dikirimkan ke pusat untuk diambil keputusan oleh pusat, mana yang berhak maju sebagai calon kepala daerah dari PDIP.

Tampak disini bahwa pengurus pusat di partai ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meloloskan bakal calon yang diajukan dari pengurus daerah. Meskipun dalam proses ini mengajukan calon kader perempuan, namun tetap saja keputusan berada di tangan pengurus pusat. Disini lobi-lobi terhadap pimpinan juga sangat menentukan proses seleksi ini akan tetapi tidak semua kader perempuan mau melakukannya karena mereka menganggap bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan lobi-lobi seperti itu.

Setelah proses penetapan calon kepala daerah dari masing-masing parpol selesai dilaksanakan, parpol-papol tersebut mulai mengadakan koalisi dengan partai lain untuk dapat mengusung calon yang akan didaftarkan baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai wakil kepala daerah. Namun dalam pencalonan ini, kendala internal dari kader perempuan pada tahap ini yaitu terkait dengan persoalan psikologis yang sering dirasakan oleh kader perempuan seperti kesulitan membagi waktu dan memilih untuk dapat mengikuti antara kegiatan partai dan rumah tangga atau keluarga.

Selain itu masalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh kader perempuan untuk dapat terlibat penuh dalam kegiatan partai juga merupakan kendala yang sangat mereka rasakan dan sangat menghambat aktivitas mereka dalam partai, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat hadir dalam pertemuan-peremuan ataupun rapat partai yang umumnya dilakukan pada malam hari dan membuat

mereka tidak bias menghadiri rapat dan mempengaruhi keputusan rapat tersebut, karena memang mereka kesulitan membagi waktu antara mengikuti kegiatan partai atau tetap berada ditengah-tengah keluarganya.

Factor lain yang mempengaruhi keterlibatan kader perempuan dalam partai yakni karena rendahnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak politiknya dan kurangnya wawasan dan pemahaman perempuan tentang politik sehingga menyebabkan perempuan jauh tertinggal dari laki-laki.

Selain itu untuk bisa maju dalam suatu pemilihan kader perempuan harus dihadapkan pada masalah dana yang menjadi modal awal bagi kita untuk bisa maju baik itu sebagai caleg maupun sebagai calon kepala daerah. Apalagi dalam pilkada langsung sekarang ini menggunakan dana pribadi, bukan dari partai, maka secara otomatis bagi calon yang hendak maju dalam pilkada harus menyiapkan sejumlah dana yang cukup besar untuk mendanai kampanye dan kegiatan lainnya dalam rangka penggalangan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Sedangkan kader perempuan pada umumnya adalah seorang istri atau ibu rumah tangga yang tidak semuanya bekerja, dalam hal ini tentu saja kader perempuan tersebut kesulitan untuk dapat mengumpulkan sejumlah dana yang besar untuk bisa maju dalam pemilihan. karena bagi perempuan masih banyak hal lain didalam rumah tangga yang harus dipikirkan soal materi ini, mereka harus bisa berpikir logis untuk bisa mengorbankan sejumlah materi yang besar untuk bisa maju dalam suatu pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa kader perempuan tersebut belum memiliki kesiapan mental untuk mengambil resiko dalam setiap usaha politik yang dilakukannya.

Selain itu kendala psikologis yang juga kerap kali dirasakan oleh kader perempuan yaitu diantaranya seperti kesulitan untuk menghilangkan perasaan malu, tidak percaya diri dan merasa rendah diri, dan hal tersebut sangat sulit untuk mereka hilangkan. Seorang kader perempuan dari PDIP mengakui bahwa untuk melakukan suatu usaha politik pada tahap penetapan calon dari partai lobi-lobi dengan pimpinan partai sangat menentukan hasilnya nanti, dan untuk dapat melakukan usaha tersebut mereka mengaku tidak suka melakukan hal seperti itu.

Kendala Pada Tahap Pelaksanaan Kampanye Pilkada

Setelah masing-masing pasangan calon dari masing-masing parpol peserta pilkada didaftarkan ke KPUD, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik yaitu menggalang dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat melalui kegiatan kampanye dalam berbagai bentuk, seperti tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, rapat umum, debat public dan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Seperti di PAN kader perempuan partai yang tergabung dalam PUAN (perempuan amanah) yaitu sebuah badan otonom dibawah naungan partai yang berfungsi mewadahi aktifitas kader perempuan dalam partai melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah, seperti mendatangi organisasi perempuan didesa-desa seperti PKK untuk menyampaikan visi dan misi calon dari partai tersebut, mengikuti kegiatan ibu-ibu PKK tersebut seperti arisan dan pengajian sambil berkampanye memperkenalkan pasangan calon kepala daerah tersebut.

Kendala lain yang juga dirasakan sangat menghambat kader perempuan untuk dapat beraktivitas penuh dalam kegiatan parpol terutama dalam kegiatan kampanye pikkadayaitu masalah waktu. Perempuan kesulitan dalam membagi waktu antara kegiatan rumah tangga, kerja dan kegiatan di partai. Sekali waktu muncul persoalan dilematis dalam diri kader perempuan tersebut untuk memilih mana yang harus didahulukan antara keluarga dan kegiatan partai.

Dalam hal ini dukungan dari keluarga dirasa sangat dibutuhkan sekali untuk diri perempuan itu dapat melangkah mengikuti kegiatan partai yang kadang tidak mengenal waktu dan tempat. Kadang sebagai pengurus mereka harus hadir dalam rapat-rapat partai yang dilakukan pada malam hari. Hal senad juga disampaikan oleh kader perempuan dari PKB yang memiliki dilema untuk memilih mengikuti kegiatan di partai dan rumah tangga.

Selain itu sebagai seorang warga masyarakat lingkungan sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan perilaku seseorang sehari-hari. Ada sebagian masyarakat yang memandang buruk terhadap aktivitas seorang perempuan didalam partai. Mereka menganggap partai adalah dunia laki-laki dan tidak pantas bagi seorang perempuan bergaul dan beraktivitas dalam dunia laki-laki tersebut. Ada juga sebagian daerah yang tidak ingin perempuan itu maju, karena mereka menganggap tidak baik melangkah laki-laki dan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Hal-hal seperti ini tentu saja dapat membentuk persepsi tersendiri bagi masing-masing kader perempuan untuk dapat melangkah dan beraktivitas dalam partai politik.

Kendala Pada Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara

Setelah tahapan kampanye selesai dilaksanakan maka tinggal menunggu hari pemungutan suara. Dalam hal ini menunjukkan saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara parpol mengirimkan masing-masing utusannya ke TPS-TPS dan tentu saja tidak menutup kemungkinan saksi dari kader perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa kader perempuan tetap dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh partai, dan jelas kader perempuan memiliki kemampuan untuk itu, asalkan diberikan kesempatan yang sama dengan kader laki-laki.

Pada proses pemungutan dan penghitungan suara diperlukan saksi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah yang hal itu berarti berasal dari parpol peserta pilkada. Disini proses penunjukkan saksi dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol dimana dalam proses ini banyak didominasi oleh laki-laki sebagai mayoritas dalam partai. Hal ini dikarenakan kader perempuan sebagai minoritas dalam partai merasa tidak mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan kader laki-laki dengan jumlah mereka yang minoritas tersebut.

Selain itu kesulitan untuk membagi waktu dan menentukan prioritas mana yang harus didahulukan antara urusan rumah tangga dan kegiatan di partai juga umumnya dirasakan oleh sebagian besar kader perempuan partai tersebut disamping juga kurangnya kesiapan mental untuk mengambil resiko dalam suatu usaha politik yang mereka lakukan seperti dalam hal pencalonan yang mengharuskan untuk mengeluarkan sejumlah dana atau materi yang cukup besar untuk membiayai kegiatan kampanye nantinya dan kader perempuan tidak

memiliki keberanian untuk menanggung resiko terburuk nantinya yang akan terjadi setelah pilkada selesai dilaksanakan yaitu kalah dalam pemilihan. Hal ini berpengaruh sekali terhadap aktivitas politik kader perempuan tersebut.

Sejumlah kendala yang dihadapi oleh kader perempuan tersebut seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius lagi dari partai dan kader laki-laki dalam partai tersebut, karena pada dasarnya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan kader laki-laki untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan parpol.

Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Kegiatan Parpol yang Dilakukan Oleh Kader Perempuan .

Upaya yang dilakukan oleh kader perempuan yang didapat dari penelitian ini antara lain : meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai politik, mengadakan kegiatan bersama LSM, melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan partai ataupun secara pribadi. Namun upaya yang dilakukan memerlukan dukungan semua pihak, tidak saja diri pribadi dari kader tapi juga keluarga sebagai lingkungan terdekat. Hal ini dikarenakan para perempuan merupakan bagian dari rumah tangga yang memerlukan izin dari suami. Dukungan lainnya harus datang dari parpol itu sendiri, karena parpol merupakan wadah bagi mereka untuk dapat menyalurkan segala bakat politik dan semua kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan parpol.

Upaya Yang Dilakukan Parpol

Dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh kader perempuan tersebut selain upaya yang dilakukan oleh kader itu sendiri, parpol sebagai tempat beraktifitas kader perempuan tersebut juga melakukan berbagai upaya antara lain : mendirikan suatu badan otonom yang khusus diperuntukkan bagi perempuan, mengikutkan dalam kegiatan partai seperti kampanye dan pencalonan, melakukan pelatihan yang diikuti kader perempuan untuk meningkatkan wawasan politiknya, menggalang upaya dengan lembaga – lembaga perempuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan melakukan seminar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat partai telah menunjukkan perhatian yang cukup tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi kader perempuan dari partainya. Dan hal ini tentu saja diharapkan dapat membantu perempuan mengatasi berbagai kendala yang mereka rasakan selama ini dalam mengikuti kegiatan partai.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kendala internal yang dihadapi oleh kader perempuan untuk bisa terlibat penuh dalam kegiatan politik partai pada proses pelaksanaan Pilkada sebagai berikut :

1. Kesulitan perempuan untuk membagi waktu antara kegiatan di partai dan dalam keluarga karena keputusan-keputusan penting dalam partai umumnya dihasilkan pada rapat-rapat partai yang dilakukan pada malam hari. Hal ini membuat kader perempuan tersebut kesulitan untuk dapat mengikuti dan akibatnya mereka tidak bisa ikut terlibat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dalam partai.
2. Kesiapan mental perempuan yang tidak berani untuk mengambil resiko dalam usaha politik yang mereka lakukan, seperti menyiapkan sejumlah dana yang besar untuk bisa maju dalam pemilihan dan juga rasa tidak

percaya pada kemampuan diri dan rendah diri untuk melakukan dan menerima sejumlah tanggung jawab yang besar.

3. Pemahaman dan wawasan politik yang dimiliki kader perempuan masih kurang terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut. Hal ini menyebabkan di dalam diri perempuan tersebut terbentuk persepsi/pandangan yang menganggap bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki seperti menjadi pemimpin. Persepsi seperti ini masih menjangkiti diri perempuan karena kurang memahami pentingnya peranan mereka dalam mempengaruhi pengambilan keputusan politik partai.
4. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh kader perempuan untuk dapat mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan pemahaman dan wawasan dibidang politik melalui kegiatan pelatihan kader, seminar dan diskusi politik. Untuk dapat membagi waktu, kader perempuan berusaha untuk sharing dengan keluarga dan teman kerja bareng tentang kesibukan di partai dan dalam hal kampanye berusaha memberikan bantuan moril dan materil seperti menjadi tenaga sukarela dan membantu dengan dana pribadi.
5. Sedangkan upaya yang dilakukan parpol dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mendirikan badan otonom di bawah partai yang banyak melakukan kegiatan kewanitaan, memberikan kesempatan kepada perempuan sebagai juru kampanye, berusaha mengadakan rapat pertemuan partai pada siang hari, mengadakan diklat dan seminar tentang politik perempuan.

Dengan melihat hasil penelitian di atas yaitu sejumlah kendala yang dihadapi oleh kader perempuan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan parpol, maka seharusnya partai meningkatkan lagi kepeduliannya terhadap permasalahan yang dihadapi kader perempuan tersebut dengan serangkaian kegiatan yang benar-benar dirasakan oleh kader perempuan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku-buku Utama

- Amal, DR. Ichlasul, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana : Yogyakarta, 1988.
- Asri Harahap MM, DR.Ir.H. Abdul, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, PT. Pustaka Cidesindo : Jakarta, 2005.
- Budiardjo, Prof. Miriam (ed), *Partisipasi dan Partai Politik* , Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, 1998.
- Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1992.
- Demokrasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta,1998.
- C.Ollenburger, Jane, dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 1996.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta 2001.
- Huntington, Samuel P, dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Rineka Cipta : Jakarta, 1994.
- Subono, Nur Iman, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan dan The Japan Fondation : Jakarta, 2003.
- Sajogyo, Pudjiwati, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, CV. Rajawali : Jakarta , 1993.

Buku Metodologi

- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES : Jakarta, 1989.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung ,1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara : Jakarta, 1989.

Undang-undang Dan Peraturan-peraturan Lainnya

Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jambi, *Daftar Nama Calon Legislatif Provinsi Jambi Pada Pemilu 2004*.
Daftar Tim Kampanye Pilkada Provinsi Jambi, 2005.

UU No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005 Tentang *Perubahan Atas UU No.32 tahun 2004*.

PP No.6 Tahun 2005 Tentang *Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.

PP RI No.17 Tahun 2005, Tentang *Perubahan Atas PP No.6 Tahun 2005*

Keputusan KPU Provinsi Jambi No.1 Tahun 2005 Tentang *Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi*.

Jurnal, Media Massa dan Lainnya

Jurnal Perempuan Edisi 34, Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan dan The Ford Foundation, Jakarta, 2004.

Harian *KOMPAS*, Tgl 10 Februari 2005.

Yulianis, Novi, *Motivasi Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Politik*,
SKRIPSI, FISIP UNAND 2005.